

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Andi Nurhaedah¹, A. Tenriola²

^{1,2}STIEM Bongaya, Makassar, Sulawesi Selatan.

¹andi.nurhaeda@stiem-bongaya.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang diberikan. Populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh OPD kabupaten Sinjai yang berjumlah 40 instansi, sementara itu teknik pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan memilih unit populasi berupa dinas sehingga diperoleh sampel sebesar 66. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda serta menggunakan SPSS sebagai alat pengolahan data. Berdasarkan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai

ABSTRACT

This research was conducted to determine The Effect of Regional Financial Management, Accountability, And Transparency on the Financial Performance of The Regional Government of Sinjai Regency. This study uses primary data obtained from respondents' answers to the questionnaire given. The population in this study were all OPD Sinjai district, totaling 40 agencies, while the sample selection technique used a purposive sampling method by choosing a population unit in the form of an agency so that a sample of 66 was obtained. In addition, this study used multiple regression analysis and used SPSS as a processing tool data. Based on the tests conducted, it shows that Regional Financial Management has no effect and is not significant on Regional Government Financial Performance, whereas Accountability has a positive and significant effect on Regional Government Financial Performance, and Transparency has a positive and significant effect on District government financial performance and Sinjai.



Mengutip artikel ini sebagai : Nurhaedah dan Tenriola, A. 2022. Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. *Tangible Jurnal*, 7, No. 2, Desember 2022, Hal. 161-170.
<https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.304>

Volume 7

Nomor 2

Halaman 161-170

Makassar, Desember 2022

p-ISSN 2528-3073

e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk

19 Desember 2022

Tanggal Revisi

20 Desember 2022

Tanggal diterima

20 Desember 2022

Kata kunci :

Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi

Keywords :

Regional Financial Management, Accountability, Transparency

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada era globalisasi ini perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah melakukan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya (Putu dan Indraswarawati, 2021). Kinerja pemerintah dapat

dikatakan baik bisa dilihat dari pencapaian hasil kinerja yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal serta tercapai sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Di Indonesia, suatu daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri daerahnya yang disebut dengan otonomi daerah. Kepercayaan atas pengelolaan daerah ini menjadikan kinerja dalam pelaksanaan pemerintah menjadi sorotan publik. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri jika mampu menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya atau mampu menyelenggarakan otonomi daerah yang baik memiliki ciri dan kemampuan dibidang keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan keuangan daerah mendefinisikannya sebagai semua aktivitas atau kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan daerah. Suryani dan Robinsyah (2022) menyatakan bahwa dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka akan berdampak pada kinerja keuangan daerah yang baik pula.

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kewajiban bagi instansi pemerintahan, sehingga dapat diketahui kinerja instansi tersebut. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, setiap instansi diharapkan dapat dilakukan secara akuntabel dan transparansi, sehingga dalam penilaian kinerja dapat tergambar kondisi semestinya instansi tersebut.

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Sulawesi Selatan dan menjadi kabupaten mendapat sorotan publik. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sinjai sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 memperoleh opini WDP, namun sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 Kabupaten dapat mencapai dan mempertahankan opini audit dari BPK dengan penilaian maksimal yaitu WTP.

Tabel 1 Opini Audit BPK RI terhadap Kabupaten Sinjai

Tahun	Opini
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber www.bpk.go.id Kabupaten Sinjai

Pencapaian opini maksimal Kabupaten Sinjai selama 6 tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan dengan baik. Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah itu sendiri, dimana keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat di ukur semata-mata dari perspektif keuangan, surplus atau defisit dalam laporan keuangannya saja juga tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan karena sifat dasarnya tidak mencari profit, melainkan keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga diukur dari kinerjanya pemerintah (Jatmiko, 2020).

Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang saling keterkaitan antara sasaran straregis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa

pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh dalam meningkatkan kinerja suatu instansi atau organisasi Suryana et al., (2017). Menurut Edowati et al., (2021) akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik.

Selain akuntabilitas, transparansi juga merupakan hal penting dalam tercapainya kinerja yang baik. Menurut Edowati et al., (2021) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Suatu instansi pemerintahan dapat dikatakan transparan apabila penyelenggaraan pemerintah dapat diakses dan diketahui dengan mudah oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa menyeleksi dan mengevaluasi kinerja pemerintah (Laga & Hidayat, 2021). Dengan tercapainya transparansi, maka dapat membantu mengurangi peluang terjadinya *fraud* atau kecurangan.

LANDASAN TEORI

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Halim, Abdul (2012: 24) menyatakan bahwa keuangan pemerintah adalah hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara lain sebagaimana yang disampakan oleh undang-undang. Sementara itu, kinerja keuangan daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja keuangan daerah perlu dilakukan pengukuran sehingga dapat dinilai dan dievaluasi.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2012, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah. Kegiatan yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka tercapainya visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu (Mardiasmo, 2016: 121):

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah;
2. membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan; dan
3. mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Mahsun (2017: 196) terdapat beberapa indikator kinerja keuangan pemerintah daerah yang meliputi:

1. Indikator Masukan (*Input*)

Indikator masukan meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya jumlah dana yang dibutuhkan dan jumlah waktu yang digunakan.

2. Indikator Proses (*Process*)

Indikator proses merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya

ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran meliputi segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan berupa fisik atau nonfisik. Misalnya jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa.

4. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator hasil meliputi segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas pada karyawan atau pegawai.

5. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat meliputi segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegritas yang diwujudkan dalam anggaran daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah Mardiasmo, (2017).

Menurut Anwar & Meutia, (2021) terdapat beberapa fungsi pengelolaan keuangan daerah yang melekat pada unsur-unsur dari pelaksanaan tugas, meliputi:

1. Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah
2. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Adanya tolak ukur kinerja serta standarisasi
4. Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi
5. Adanya pelaporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah, dan
6. Terdapat fungsi pengendalian dan pengawasan keuangan daerah.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik Mardiasmo, (2014:20). Sementara itu, Lukito Penny (2014:2) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya. Adapun Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik."

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas juga melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya (Damayanti & Hermanto, 2018).

Menurut Novatiani et.al, (2019) akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi beserta indikator yang meliputi:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum yaitu meliputi: penghindaran korupsi dan kolusi dan kepatuhan terhadap hukum
2. Akuntabilitas proses yang meliputi: adanya kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan publik yang cepat, adanya pelayanan publik yang responsive dan adanya pelayanan publik yang murah biaya.
3. Akuntabilitas program yang meliputi: mempertanggung jawabkan yang telah dibuat dan program yang sesuai dengan tujuan hasil yang optimal.
4. Akuntabilitas kebijakan yaitu : mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil.

Sementara itu, Damayanti & Hermanto, (2018) menyatakan dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam peningkatan akuntabilitas, meliputi:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelola pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparansi dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Transparansi

Damayanti (2018) menyebutkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan informasi yang merupakan komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah SAP pada lampuran 1.01 menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 disebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, dan informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang kepatuhan, dan kepentingan umum.

Novatiani et al., (2019) menyatakan bahwa prinsip-prinsip transparansi menekankan pada dua aspek dengan indikator-indikatornya, yaitu:

1. Komunikasi publik oleh pemerintah yaitu meliputi : penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab dan menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi yaitu meliputi : kemudahan akses informasi dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2018) dengan judul analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Elkha & Wahidawati (2020) dengan judul pengaruh pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah menunjukkan bahwa pengendalian internal, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan transparansi pengelolaan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di OPD Kabupaten Gresik.

Begitupun penelitian Edowati et,al (2021) dengan judul analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang diberikan. Populasi dalam penelitian ini Organisasi Perangkat Desa di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 40. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dimana sampel yang dipilih harus berbentuk dinas dan pegawai dengan minimal kerja selama 2 tahun dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga diperoleh sampel sebanyak 66 yang terdiri dari 22 dinas dan setiap dinas diwakili oleh 3 pegawai.

Penelitian yang menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS sebagai alat pengolahan data. Sebelum data diolah, terlebih dahulu dilakukan uji instrument untuk memastikan validitas dan reabilitas instrument yang digunakan. Kemudian data diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik yang kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen

Berdasarkan pengujian dilakukan menunjukkan bahwa nilai *test statistic* yang diperoleh yaitu 0,097 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.767	6

Sumber: Data diolah SPSS (2022)

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* (α) setiap variabel diatas 0,767, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat realibilitas variabel yang digunakan dalam penelitian ini baik serta kuesioner pada setiap variabel akan mampu digunakan untuk memperoleh data yang konsisten sehingga semua instrument pernyataan kuesioner menunjukkan keandalan dalam mengukur variabel dalam penelitian ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 3 Hasil Uji Coefficients^a

Model	Uns tandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	6.219	2.900			2.144	.036
Pengelolaan keuangan daerah	-.210	.140	-.160		-1.497	.140
Akuntabilitas	.798	.159	.575		5.013	.000
TRANSPARANSI	.326	.125	.287		2.613	.011

a. Dependent Variable: Kinerja keuangan pemerintah daerah

Sumber: Output SPSS 26, Data Primer (diolah,2022)

Berdasarkan tabel 3 di atas, maka dapat diketahui bahwa:

1. Variabel pengelolaan keuangan daerah (X1) diperoleh nilai *sign* sebesar 0,140 dengan $\alpha = 0,05$, serta diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -1.497 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.999. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang berarti bahwa variabel penglolaan keuangan edaerah (X1) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).
2. Variabel akuntabilitas (X2) diperoleh nilai *sign* sebesar 0,000 dengan $\alpha = 0,05$, serta diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -5.013 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.999. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditoleh dan H1 diterima yang berarti bahwa
3. Variabel transparansi (X3) diperoleh nilai nilai *sign* sebesar 0,11 dengan $\alpha = 0,05$, serta diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,613 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.999. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditoleh dan H1 diterima yang berarti bahwa

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	Model Summary ^b				Change Statistics				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.697 ^a	.485	.460	1.685	.485	19.482	3	62	.000

a. Predictors: (Constant), TRANSPARANSI, Pengelolaan keuangan daerah , Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Kinerja keuangan pemerintah daerah

Sumber: Output SPSS 26, Data Primer (diolah,2022)

Berdasarkan tabel 4 di atas, maka diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,485 atau 48,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi sebesar 48,5% oleh variabel pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi. Sedangkan sebanyak 51,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 tahun 2019 pasal 1 ayat 2 tentang pengelolan keuangan daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan ditemukan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintahan daerah di kabupaten Sinjai. Tidak terdapatnya pengaruh tersebut disebabkan oleh hal, seperti belum maksimalnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dibidang keuangan oleh pegawai pemerintahan. Selain itu, temuan ini juga disebabkan oleh masih lemahnya pemanfaatan sistem anggaran termasuk dalam hal ini bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan tidak konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengeluaran keuangan daerah yang dilakukan belum berorientasi pada pencapaian visi-misi, tujuan dan hasil terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Veronica *et al.*, (2020) dan Agustina & Saifanur, (2020) yang mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Teori stakeholder menyatakan bahwa stakeholder berperan sebagai pemerintah mengindikasikan bahwa semakin baik bentuk pertanggungjawaban pemerintah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin baik. Setiap instansi pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja. Kedua laporan tersebut harus dapat menjelaskan seluruh hasil dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat menilai apakah pemerintah telah melaksanakan kinerjanya secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elkha & Wahidawati, (2020) dan (Nasution, 2018) yang mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa memberikan pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan, dimana semakin baik bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat, maka semakin baik pula pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi dalam hal ini terkait pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan OPD dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah termasuk kegiatan yang dilakukan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik sehingga menciptakan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Adapun informasi yang diberikan secara memadai dan mudah dipahami digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Edowati, *et.al.* (2021) dan Elkha & Wahidawati, (2020) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan

bahwa dengan memberikan Informasi yang memadai dan mudah dipahami dan digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi. Akses untuk memperoleh informasi sangatlah penting dalam menjamin pertanggungjawaban pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukannya penarikan kesimpulan terhadap hipotesis yang telah ditentukan bahwa:

1. Penggunaan pernyataan dalam kuesioner telah valid dan reliabel, sehingga data dapat diolah lebih lanjut.
2. Data yang diperoleh dengan kuesioner telah lolos uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.
3. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, variabel Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N., & Saifanur, A. (2020). *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara*. 85–98.
- Anwar, A., & Meutia, T. (2021). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kota Langsa*.
- Damayanti, E., & Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Da*, 7(3), 1–21. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/97>
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Elkha, F., & Wahidawati. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–19.
- Halim, & Abdul. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah dan Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Laga, Y. M. V. I., & Hidayat, M. T. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Lukito, Penny, K. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor*

- Mahsun, M. (2017). *Peasants And Politics: Achievements And Limits Of Popiular Agency In Batang, Central Java* (Y. I. Institut (ed.)).
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE.
- Mardiasmo. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *JOMFekom*, 4(1), 843-857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Nasution, dito darma nasution. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149-262
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51-62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Veronica, stevani, Layuk, A., & rante, andika. (2020). Pengaruh Pengawasan, Sistem Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 17(4), 548-557. <https://doi.org/10.37476/akmen.v17i4.1154> Universitas Brawijaya. Malang